

Pengaruh Konektivitas Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Lampung: Perspektif Ekonomi Islam 2015-2024

Diah Ayu Permata^{1,*}, Madnasir², Nur Wahyu Ningsih³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung-Indonesia, 35131

*diahayupermataaa@gmail.com, madnasir@radenintan.ac.id, nurwahyu@radenintan.ac.id

Diterima: 03-11-2025

Direvisi: 18-12-2025

Disetujui: 02-01-2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana konektivitas infrastruktur berpengaruh terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi dan kinerja sektor pariwisata di Provinsi Lampung periode 2015–2024, dengan menjadikan perspektif ekonomi Islam sebagai landasan analitis utama. Data yang digunakan bersumber dari statistik resmi BPS, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata Lampung, yang kemudian diolah melalui pendekatan kuantitatif menggunakan model Vector Autoregression (VAR), meliputi tahapan pengujian lag optimal, stabilitas model, kointegrasi, kausalitas Granger, serta uji stasioneritas pada tingkat second difference. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model VAR berada dalam kondisi stabil dengan lag optimal 2 dan tidak menemukan hubungan kointegrasi jangka panjang maupun kausalitas yang signifikan antara variabel Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Wisata, dan Konektivitas Infrastruktur. Nilai koefisien determinasi sebesar 87,4% mengindikasikan bahwa konektivitas infrastruktur mampu menjelaskan sebagian besar pergerakan pertumbuhan ekonomi dan sektor wisata, meskipun secara parsial pengaruh konektivitas infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat positif namun tidak signifikan (koefisien 3,016), sedangkan terhadap sektor wisata bernilai negatif dan tetap tidak signifikan (koefisien -52,079). Ditinjau dari kacamata ekonomi Islam, temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola berbasis maqashid al-shariah antara lain keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan pelestarian lingkungan untuk merespons risiko overtourism dan ketimpangan distribusi manfaat. Dengan demikian, berbeda dari studi konvensional, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif-empiris yang menghubungkan kinerja infrastruktur dengan nilai-nilai syariah guna merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan regional Lampung yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Kata kunci: Infrastruktur; Pertumbuhan ekonomi; Pariwisata; Islam

ABSTRACT

This study examines in depth how infrastructure connectivity influences the dynamics of economic growth and the performance of the tourism sector in Lampung Province for the period 2015–2024, using an Islamic economic perspective as the main analytical basis. The data used are sourced from official statistics from BPS, the PUPR Office, and the Lampung Tourism Office, which are then processed through a quantitative approach using the Vector Autoregression (VAR) model, including the stages of optimal lag testing, model stability, cointegration, Granger causality, and stationarity testing at the second difference level. The estimation results show that the VAR model is stable with an optimal lag of 2 and does not find a long-term cointegration relationship or significant causality between the variables of Economic Growth, Tourism Sector, and Infrastructure Connectivity. The coefficient of determination value of 87.4% indicates that infrastructure connectivity is able to explain most of the movements in economic growth and the tourism sector, although the partial effect of infrastructure connectivity on economic growth is positive but not significant (coefficient of 3.016), while its effect on the tourism

sector is negative and remains insignificant (coefficient of -52.079). From an Islamic economic perspective, these findings emphasize the importance of integrating physical infrastructure development with strengthening human resource quality and governance based on maqashid al-shariah, including social justice, public welfare, and environmental preservation to respond to the risks of overtourism and unequal distribution of benefits. Thus, unlike conventional studies, this research offers a normative-empirical approach that links infrastructure performance with sharia values to formulate recommendations for regional development policies in Lampung that are more inclusive, sustainable, and oriented towards long-term welfare.

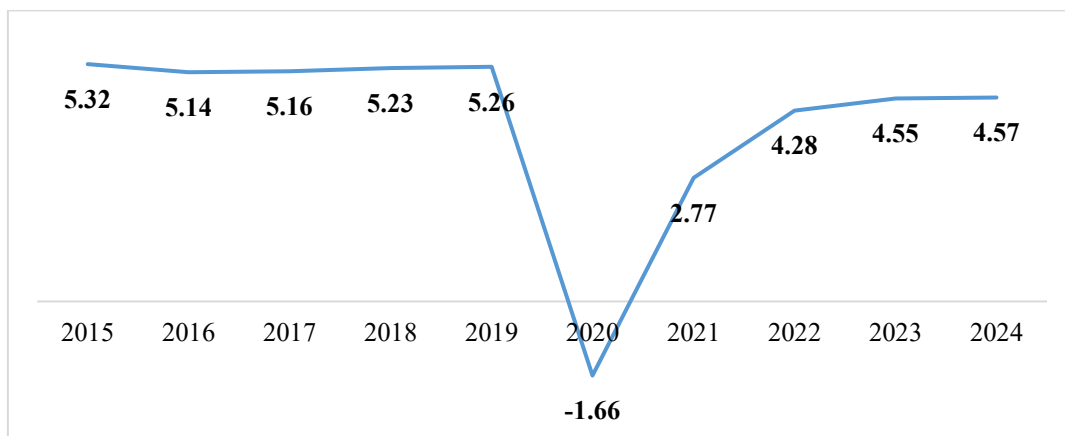
Keywords: Infrastructure; Economy growth; Tourism; Islamic

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih dalam tahap berkembang dan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong kemajuan ekonomi serta pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah termasuk Indonesia. Pembangunan infrastruktur sebagai elemen krusial pun tidak terabaikan, ketika sebuah negara memiliki infrastruktur yang memadai dan tepat guna, target-target ekonomi dapat dicapai dengan lebih mudah. Dampaknya juga merembet ke ranah sosial, sehingga secara tidak langsung memperkuat kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Yang tak kalah esensial, pembangunan semacam ini haruslah demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan didasari oleh agenda pribadi segelintir individu (Gultom & Tini, 2020).

Menurut Prof. Simon Kuznets (2002), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai macam barang ekonomi yang semakin beragam dan jumlahnya bertambah bagi masyarakatnya. Kenaikan kapasitas ini didukung oleh kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan perubahan ideologi yang memungkinkan negara tersebut memperluas dan memperkaya jenis serta volume barang ekonomi yang dapat diakses oleh penduduknya. Kondisi ini bukan hanya sekedar penambahan kuantitas produksi, melainkan juga mencakup perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan peningkatan output yang secara nyata dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi menurut Lincolin Arsyad (2019) dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan kuantitatif, melainkan juga termasuk dalam konteks perubahan struktur ekonomi yang mungkin terjadi selama periode tertentu. Pandangan ini menekankan bahwa pertumbuhan adalah fenomena yang lebih luas dan tidak hanya sekedar kenaikan angka produksi total.

Konektivitas infrastruktur secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Lampung melalui prinsip maqasid syariah yang menjaga hifz al-mal dan kesejahteraan umat. Data empiris periode 2015-2024 menunjukkan korelasi positif antara investasi infrastruktur seperti jalan tol Trans-Sumatra dengan peningkatan PDRB Lampung. Hubungan ini tercermin jelas pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Statistik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2025)

Grafik di atas menggambarkan tren pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat sejak awal periode 2015-2020, dengan rata-rata di atas 5% puncaknya 5,32% pada 2015 dan stabil di kisaran itu hingga 5,26% pada 2020 didukung ekspansi produksi, konsumsi, serta investasi yang lancar. Namun, tahun 2021 mengalami kontraksi tajam menjadi -1,66% akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas domestik maupun global. Pemulihan mulai terlihat pada 2022 dengan 2,77 persen, diikuti tren positif 4,28% (2023), 4,55% (2024), dan mendekati 4,57% di akhir periode, mencerminkan strategi penanganan krisis yang berhasil mengembalikan momentum stabilitas ekonomi. Hal ini menandakan respon yang efektif dan strategi pemulihan yang berhasil dalam mengatasi dampak dari fluktuasi tersebut, serta upaya terus menerus untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabil.

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah strategis di Pulau Sumatera memperlihatkan perkembangan ekonomi yang cukup menggembirakan. Lampung memanfaatkan potensi sumber daya alam yang kaya serta sektor pertanian yang dominan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Selain itu, pesatnya pembangunan infrastruktur, seperti pengembangan pelabuhan dan jaringan jalan, turut memperkuat konektivitas Lampung dengan pasar domestik maupun internasional. Sektor pariwisata juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, menjadi salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi di wilayah ini. Dinamika pertumbuhan ekonomi Lampung dapat dianggap sebagai cerminan dari sinergi antara kebijakan nasional dan pemanfaatan potensi lokal yang terus dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat setempat serta memperkuat peran Lampung sebagai pusat ekonomi regional.

Pertumbuhan tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan, tapi juga bagaimana hasil tersebut didistribusikan secara adil dan berkelanjutan antar generasi. Konsep utamanya ialah keseimbangan (*tawazun*) dan distribusi yang adil (*adl*), sehingga pembangunan modal manusia yang kuat dan prinsip kehalalan menjadi kunci pertumbuhan yang berkualitas. Dasar utama tentang pertumbuhan dan keadilan ekonomi juga berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan keseimbangan dan keadilan (Zainuddin, 2017).

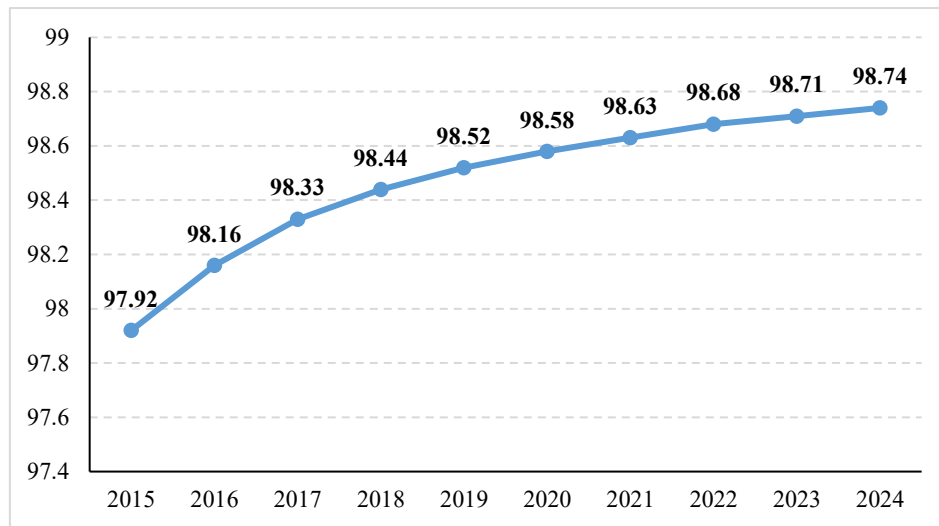
Menurut Paul Romer (2019) dalam teori pertumbuhan endogen, sumber pertumbuhan ekonomi sejati berasal dari dalam sistem ekonomi, terutama melalui investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Ide dan pengetahuan yang dihasilkan dari investasi ini bersifat tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan bersama, sehingga menimbulkan hasil jangka panjang berupa peningkatan produktivitas dan inovasi yang terus berkembang. Usaha dan insentif bagi para inovator serta kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan menjadi kunci penentu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan inovasi teknologi merupakan elemen penting dalam kerangka teori ini sebagai fondasi pendorong kemajuan ekonomi.

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian modern, memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun negara. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata tidak hanya berdampak langsung pada peningkatan konsumsi barang dan jasa yang berkaitan dengan aktivitas perjalanan tersebut, seperti penginapan, transportasi, makanan, dan hiburan, tetapi juga mengakibatkan adanya dorongan yang kuat terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung. Infrastruktur yang mencakup jaringan jalan, fasilitas transportasi umum, sarana akomodasi, serta pelayanan publik menjadi elemen krusial yang tidak bisa diabaikan untuk memastikan aksesibilitas dan kenyamanan para wisatawan. Tanpa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, potensi sektor pariwisata akan sulit berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Konsep sektor pariwisata diartikan sebagai aktivitas perpindahan individu untuk jangka waktu sementara dan bersifat sementara ke suatu tempat yang berada di luar lingkungan tempat tinggal dan tempat bekerja mereka. Aktivitas ini tidak hanya meliputi perjalanan itu sendiri, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan selama berada di lokasi tujuan wisata tersebut (Suot et al., 2021). Pariwisata merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan perpindahan orang dalam jangka waktu sementara ke suatu lokasi yang berada di luar lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Selama berada di tempat tujuan tersebut, wisatawan melakukan berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari pengalaman wisata mereka. Selain itu, pariwisata mencakup penyediaan berbagai fasilitas dan layanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, baik selama perjalanan maupun saat berada di lokasi tujuan. Dengan demikian, hal tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek

perpindahan fisik, tetapi juga pada keseluruhan proses dan dukungan layanan yang memfasilitasi pengalaman menyeluruh yang dijalani oleh wisatawan (Nabilah & Sitanggang, 2024).

Pengembangan sektor wisata di Lampung didorong oleh aksesibilitas infrastruktur yang selaras dengan ekonomi Islam melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik berbasis halal tourism. Faktor konektivitas seperti bandara dan jalan raya berkontribusi pada lonjakan jumlah wisatawan selama 2015-2024. Dinamika tersebut dapat diamati dari data pada Gambar 2 yang menampilkan pola kunjungan wisata domestik secara tahunan.



Grafik 2 Statistik Sektor Wisata berdasarkan Wisatawan Domestik

Sumber: BPS Provinsi Lampung dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung (2025)

Sektor pariwisata di Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang cukup stabil, yang didukung oleh fasilitas infrastruktur yang memadai. Namun demikian, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan, terutama terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial budaya di sekitar destinasi wisata. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur harus memperhatikan dampak jangka panjang agar pertumbuhan sektor wisata tetap berkelanjutan dan tidak merusak sumber daya alam yang menjadi modal utamanya.

Teori Daya Saing Destinasi Wisata (*Tourism Destination Competitiveness Theory*) yang dikembangkan oleh John R. Brent Ritchie dan Geoffrey I. Crouch pada 1990-an, teori ini menyatakan bahwa daya saing sebuah destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh kombinasi sumber daya inti dan atraksi, infrastruktur pendukung, serta manajemen destinasi. Infrastruktur transportasi seperti jalan, bandara, dan fasilitas layanan pendukung lainnya menjadi aspek krusial yang menentukan daya tarik destinasi, memungkinkan akses mudah bagi wisatawan dan kemudahan layanan selama kunjungan. Selain itu, manajemen destinasi yang baik juga berperan dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi yang berkelanjutan untuk memastikan destinasi tetap kompetitif dan mampu bertahan dalam persaingan global (Hossain et al., 2024).

Sektor pariwisata perlu dibangun atas fondasi prinsip syariah, khususnya melalui pengembangan pariwisata halal yang menjamin layanan ramah agama seperti penyediaan makanan bersertifikat halal, fasilitas sholat yang memadai, serta akomodasi yang bebas dari unsur haram. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi tuntutan ibadah umat Muslim, tetapi juga mendorong pemberdayaan komunitas lokal melalui peluang usaha inklusif, menjaga kelestarian lingkungan alam dengan praktik berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pariwisata halal selaras dengan *maqashid syariah* yang memprioritaskan kemaslahatan umat (*maslahah*), keadilan distributif, dan pelestarian harta serta lingkungan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Islam yang holistik dan bertanggung jawab (Hutagaluh et al., 2022).

Pembangunan infrastruktur memegang peran yang sangat krusial sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Dalam pengembangan pariwisata ramah muslim di Provinsi Lampung, prasarana dan fasilitas taman wisata, termasuk akomodasi, restoran, serta sarana ibadah, memegang peranan penting dalam mengoptimalkan potensi sektor ini. Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, dan masyarakat setempat sangat krusial untuk mendorong

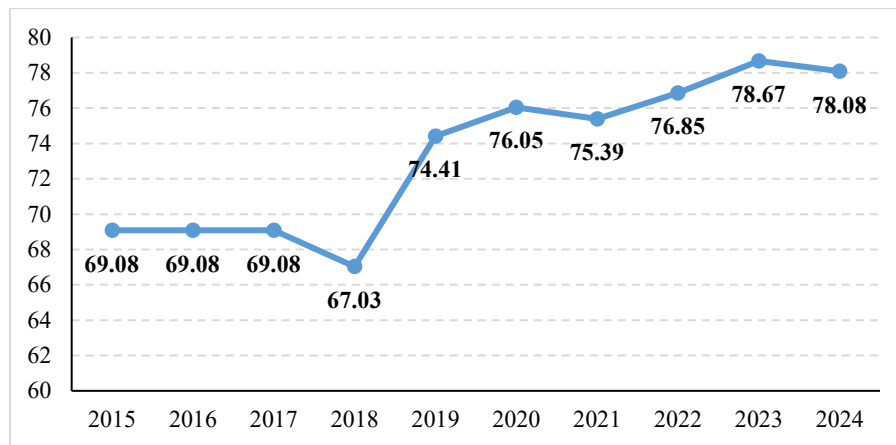
perkembangan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Melalui kolaborasi yang solid, para pemangku kepentingan dapat saling melengkapi dan memberikan dukungan guna mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata ramah muslim di Lampung, sejalan dengan nilai keberlanjutan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama (Mangiri & Sasabone, 2023). Upaya peningkatan konektivitas ini tidak semata-mata bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga berfungsi memperkokoh integrasi antarwilayah di tengah kompleksitas geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki tantangan transportasi yang unik (Collins et al., 2021).

Tata kelola transportasi pada konektivitas sering difafsirkan sebagai kemudahan dan kelancaran akses antar moda transportasi serta efisiensi perpindahan antara satu lokasi dengan lokasi lain. Faktor-faktor seperti waktu tempuh, biaya perjalanan, dan kemudahan pergantian moda transportasi menjadi aspek fundamental yang menentukan tingkat konektivitas sebuah sistem. Sistem konektivitas yang baik memungkinkan tersedianya berbagai alternatif jalur perjalanan, meminimalisir hambatan waktu, dan meningkatkan kenyamanan serta keandalan perjalanan bagi penggunaannya (Arifin, 2017). Infrastruktur transportasi yang baik yaitu meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa sekaligus mempermudah akses antarwilayah. Peningkatan konektivitas ini secara langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat menurunkan biaya logistik dan mempercepat mobilitas sumber daya manusia serta barang (Tambun et al., 2023). Investasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan turut mendukung pengembangan sektor pariwisata, yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah. Infrastruktur yang memadai, termasuk aksesibilitas yang baik, menjadikan destinasi wisata lebih mudah dijangkau oleh wisatawan, sehingga meningkatkan volume kunjungan dan pendapatan daerah (Surya et al., 2025).

Konektivitas infrastruktur juga erat kaitannya dengan desain tata ruang perkotaan, di mana kualitas konektivitas mencerminkan tingkat kemudahan mobilitas baik bagi pejalan kaki, kendaraan, maupun moda transportasi massa. Sebuah sistem dengan tingkat konektivitas yang tinggi dapat menghindarkan kemacetan serta ketidakefisienan dalam jaringan transportasi, sekaligus mendorong perencanaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, konektivitas infrastruktur menjadi landasan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi sistem transportasi, dengan imbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai, khususnya dalam hal konektivitas seperti jalan tol, dermaga, dan akses bandara, memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat dan wisatawan (Adolph, 2016). Hal ini pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi secara signifikan di kawasan tersebut. Fenomena seperti ini dapat dilihat secara jelas di Provinsi Lampung, yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang sangat besar serta posisi strategis dalam mendukung distribusi regional. Konektivitas mencerminkan sejauh mana titik-titik dalam suatu jaringan terhubung satu sama lain sehingga memungkinkan kelancaran pergerakan dan interaksi. Dalam dunia nyata, hal ini diwujudkan dalam bentuk jaringan fisik yang saling terintegrasi demi memfasilitasi pergerakan manusia dan barang secara efisien.

Investasi konektivitas infrastruktur menjadi katalis utama transformasi ekonomi Lampung dalam kerangka ekonomi Islam yang berkelanjutan. Perkembangan indeks konektivitas, termasuk panjang jalan dan akses transportasi, menunjukkan tren positif yang mendukung pertumbuhan PDRB dan wisata syariah sejak 2015 hingga 2024. Tren ini divisualisasikan secara rinci pada Gambar 3, berdasarkan data BPS Provinsi Lampung.

Grafik kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan persentase jalan mantap dari tahun 2015 hingga 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas jalan di Provinsi Lampung, yang berpotensi mendukung konektivitas infrastruktur. Kondisi jalan mantap yang semakin baik ini dapat meningkatkan efisiensi mobilitas barang, jasa, dan orang, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi menunjang pembangunan regional yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 3. Grafik Konektivitas Infrastruktur berdasarkan Kondisi Jalan Mantap Provinsi Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2025)

Teori infrastruktur yang ditegaskan oleh Vickerman (2017) mengatakan bahwa jaringan infrastruktur yang terkoneksi dengan baik sangat penting dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah dan memperkuat integrasi pasar. Hal ini memungkinkan distribusi tenaga kerja, barang, dan sumber daya berlangsung secara lebih efisien, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah secara keseluruhan. Konektivitas yang memadai juga berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional yang merata dengan mendistribusikan aktivitas ekonomi dari pusat ke daerah terpencil, dengan catatan dukungan kelembagaan dan kondisi ekonomi yang sesuai juga diperlukan.

Menurut penelitian Malik (2023), infrastruktur transportasi yang baik yaitu meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa sekaligus mempermudah akses antarwilayah. Peningkatan konektivitas ini secara langsung berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat menurunkan biaya logistik dan mempercepat mobilitas sumber daya manusia serta barang. Dengan demikian, hubungan antara konektivitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bersifat positif dan signifikan. Sedangkan peneliti lain mengatakan, investasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan turut mendukung pengembangan sektor pariwisata, yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah. Infrastruktur yang memadai, termasuk aksesibilitas yang baik, menjadikan destinasi wisata lebih mudah dijangkau oleh wisatawan, sehingga meningkatkan volume kunjungan dan pendapatan daerah. Dengan demikian, konektivitas infrastruktur tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan komunitas wisata lokal secara adil (Surya et al., 2025).

Dalam Perspektif ekonomi Islam, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan pelestarian lingkungan hidup. Konsep *maqashid al-shariah* mengajarkan bahwa pembangunan harus berorientasi pada beberapa tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat (Yadi et al., 2025). Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan harus menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan proyek infrastruktur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis. Pengelolaan sumber daya secara bijak dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang seimbang dan harmonis. Prinsip ini sejalan dengan amanah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang menyatakan:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"...dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58) (RI, 2019), yang menunjukkan bahwa bukan sekedar pembangunan fisik yang penting, tetapi juga keadilan dalam distribusi manfaatnya. Keberadaan pariwisata syariah juga dapat mendorong pengembangan ekonomi dengan menghidupkan kembali sektor industri kreatif masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah melalui pungutan seperti biaya penginapan, retribusi jasa umum, dan tiket masuk di kawasan wisata (Noviarita et al., 2021).

Pariwisata syariah mencakup beragam aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas serta layanan dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah pusat, dan daerah, semuanya tetap berpegang pada prinsip syariah Islam. Konsep ini tidak hanya terbatas pada wisata religi, melainkan merangkul berbagai jenis pariwisata selama tidak melanggar nilai-nilai syariah. Intinya, pariwisata syariah menanamkan prinsip-prinsip Islam pada setiap bentuk wisata dan dapat dinikmati oleh siapa saja (Susanto et al., 2019).

Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator sangat menentukan dalam mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kebijakan yang mengedepankan pemerataan dan inklusivitas dapat meminimalisir ketimpangan pembangunan yang selama ini masih menjadi persoalan di beberapa daerah. Pemerintah juga perlu menggandeng pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata dengan memperhatikan nilai-nilai tanggung jawab sosial dan pelestarian budaya. Sinergi tersebut akan memberikan prospek lebih besar bagi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Mangiri & Sasabone, 2023).

Pada tingkat regional, Provinsi Lampung yang dikenal sebagai pintu gerbang utama wilayah Sumatera, berperan strategis dalam jaringan konektivitas nasional. Provinsi ini telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan dan pengembangan jaringan jalan vital, fasilitas pelabuhan, serta berbagai sarana transportasi pendukung lainnya. Peningkatan kemudahan akses di Lampung turut memperlancar pergerakan manusia dan distribusi barang, yang berdampak positif pada pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Hal ini tidak hanya menguatkan posisi Lampung sebagai pusat perdagangan yang strategis, tetapi juga menambah kekuatan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di kawasan Sumatera bagian selatan. Konektivitas yang semakin baik membantu Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokalnya serta mempercepat proses integrasi dengan pusat-pusat perekonomian besar di Pulau Jawa dan wilayah lainnya, membuka peluang luas bagi pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkesinambungan. Meskipun demikian, Provinsi Lampung menghadapi ketimpangan konektivitas infrastruktur selama 2015-2024, di mana pembangunan jalan tol Trans-Sumatra dan pelabuhan Bakauheni belum merata, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi (PDRB 4-6% per tahun) dan kontribusi sektor wisata. Penelitian ini mendesak untuk mengisi kesenjangan studi empiris dengan perspektif ekonomi Islam, menawarkan solusi pembiayaan syariah seperti SBSN, wakaf produktif, dan sukuk mudharabah guna capai masalah ummah dan keadilan distribusi, sejalan komitmen nasional ekosistem syariah.

Mengingat latar belakang di atas penulis memilih judul riset ini disebabkan mengkaji pengaruh konektivitas infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor wisata di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam, yang masih tergolong langka dalam kajian ilmiah. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menekankan aspek makroekonomi konvensional tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaruh konektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor wisata selama periode 2015-2024 saja, tetapi juga mengaitkannya secara eksplisit dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, dan keadilan distribusi ekonomi sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menghasilkan sintesis analitis yang tidak hanya menggarisbawahi peran infrastruktur dalam mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata, tetapi juga menguji aplikabilitas nilai-nilai Islam dalam mekanisme pembangunan serta dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merancang program yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang hakiki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan data sekunder. Jenis data yang digunakan berupa data numerik dalam bentuk time series selama periode 2015-2024. Penelitian ini bersifat analitik dan bertujuan guna menganalisis pengaruh variabel independen yaitu Konektivitas Infrastruktur terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Wisata di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Objek penelitian adalah wilayah Provinsi Lampung secara keseluruhan dengan data time series dari tahun 2015 hingga 2024. Karena studi menggunakan data sekunder di tingkat provinsi, maka seluruh data Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Wisata dan Konektivitas Infrastruktur yang tersedia dalam periode waktu tersebut dianggap sebagai populasi penelitian tanpa pengambilan sampel khusus.

Sumber dan Analisis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari website resmi institusi pemerintah. Data tersebut meliputi data Konektivitas Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sektor Wisata yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung, Dinas Pariwisata Lampung, serta dokumen resmi pemerintah terkait pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengunduh dan mengakses data sekunder dari portal resmi institusi terkait.

Data dianalisis menggunakan metode analisis statistik kuantitatif, yang memungkinkan pengujian hubungan antara variabel independen (Konektivitas Infrastruktur) dengan variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Wisata). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Vector Autoregression* (VAR), dengan bantuan perangkat lunak statistik E-Views 9 untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Model ini dipilih karena memungkinkan analisis secara simultan, sehingga relevan untuk dinamika studi setiap variabel. Tahapan analisis meliputi: Model Uji VAR (Uji Lag Optimal, Uji Stabilitas, Uji Kointegrasi, Uji Kausalitas Granger), Uji Stasioneritas, Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Lag Optimal

Tabel 1. Hasil Uji Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-161,1429	NA	1,133723	8,639102	8,768385	8,685100
1	79,91502	431,3669	0,000006	-3,574475	-3,057342	-3,390483
2	107,4611	44,94361*	0,000002*	-4,550584*	-3,645602*	-4,228599*

Sumber: Output Eviews Model Uji Lag Optimal (2025)

Hasil analisis lag optimal model menunjukkan bahwa pada lag 2 terdapat peningkatan kinerja signifikan dibanding lag sebelumnya, ditandai dengan nilai *Log Likelihood* (LogL) tertinggi sebesar 107,4611 dan nilai *Likelihood Ratio* (LR) sebesar 44,94361 yang signifikan. Selain itu, model dengan lag 2 memiliki nilai FPE terendah ($2,15 \times 10^{-6}$), serta kriteria informasi AIC (-4,550584), SC (-3,645602), dan HQ (-4,228599) yang lebih baik dibandingkan lag 0 dan lag 1, menunjukkan bahwa model dengan dua lag merupakan pilihan terbaik dalam menjelaskan pemilihan data pada penelitian ini.

Uji Stabilitas VAR

Tabel 2. Hasil Uji Stabilitas VAR

Root	Modulus
0,933921	0,933921
0,777078 - 0,281915i	0,826635
0,777078 + 0,281915i	0,826635
0,651912	0,651912
0,472563 - 0,161051i	0,499253
0,472563 + 0,161051i	0,499253

Sumber: Output Eviews Model Uji Stabilitas VAR (2025)

Hasil analisis nilai akar (root) model menunjukkan bahwa seluruh akar memiliki modulus kurang dari satu, dengan nilai tertinggi sebesar 0,933921 dan nilai kompleks dengan modulus tertinggi 0,826635. Hal ini mengindikasikan bahwa model memenuhi kriteria kestabilan karena semua akar berada di dalam *unit circle*, sehingga model yang digunakan adalah stabil dan dapat dipercaya dalam melakukan prediksi atau analisis lebih lanjut berdasarkan data yang ada. Stabilitas model ini sangat penting untuk validitas hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil dari model tersebut.

Uji Kointegrasi

Tabel 3. Hasil Uji Kointegratif

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None	0,290197	21,14467	24,27596	0,1180
At most 1	0,181202	8,462275	12,32090	0,2030
At most 2	0,028381	1,065303	4,129906	0,3510

Sumber: Output Eviews Model Uji Kointegratif (2025)

Hasil uji kointegrasi berdasarkan *statistik trace* membuktikan jika tidak terdapat hubungan kointegrasi yang signifikan antar variabel yang diuji. Hal ini terlihat dari nilai *statistik trace* sebesar 21,14467 dengan nilai kritis 24,27596 dan probabilitas 0,1180 pada hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya kointegrasi. Selain itu, pada hipotesis alternatif dengan jumlah kointegrasi paling banyak satu dan dua, nilai *statistik trace* juga lebih kecil dari nilai kritis dengan probabilitas yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol tidak ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti kointegrasi antara variabel-variabel dalam model ini, yang mengindikasikan tidak adanya hubungan jangka panjang yang stabil antar variabel tersebut.

Uji Kausalitas Granger

Tabel 4. Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
SW does not Granger Cause PE	38	0,86572	0.4301
PE does not Granger Cause SW		0.22274	0,8015
KI does not Granger Cause PE	38	1,05857	0.3584
PE does not Granger Cause KI		0.00403	0,9960
KI does not Granger Cause SW	38	2,44900	0.1019
SW does not Granger Cause KI		2.06187	0,1433

Sumber: Output Eviews Kausalitas Granger (2025)

Hasil uji kausalitas Granger di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Hal ini diperkuat oleh nilai probabilitas (p-value) dari uji F-statistik yang semuanya lebih besar dari 0,05, yaitu SW tidak menyebabkan PE ($p = 0,4301$), PE tidak menyebabkan SW ($p = 0,8015$), KI tidak menyebabkan PE ($p = 0,3584$), PE tidak menyebabkan KI ($p = 0,9960$), KI tidak menyebabkan SW ($p = 0,1019$), dan SW tidak menyebabkan KI ($p = 0,1433$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung adanya hubungan kausalitas Granger antar variabel dalam model, sehingga masing-masing variabel tidak dapat dijadikan prediktor kausal yang signifikan bagi variabel lainnya.

Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*)

Tabel 5. Hasil Uji Stasioneritas Pada *Second Difference*

Variabel	Prob	Alpha	Ket
PE	0,0001	0,05	Stasioner
SW	0,0002	0,05	Stasioner
KI	0,001	0,05	Stasioner

Sumber: Output Eviews Uji Stasionertitas (2025)

Hasil pada Tabel 5, menunjukkan bahwa semua variabel stasioner pada tingkat *second difference* (II) karena mempunyai nilai probabilitas kurang dari nilai alpha (0,05). Hasil uji stasioneritas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel yang dianalisis, yakni variabel konektivitas infrastruktur dan variabel pertumbuhan ekonomi serta sektor pariwisata, telah memenuhi syarat stasioner setelah melalui proses *second difference*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga menandakan bahwa data time series variabel-variabel tersebut tidak mengandung akar unit dan secara statistik dapat dikatakan stasioner pada tingkat differencing tersebut. Dengan demikian, data yang digunakan sudah layak untuk analisis lebih lanjut tanpa menimbulkan masalah non-stasioneritas.

Uji F Statistik

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis F Statistik

F Statistik	F-Tabel	Prob.	Keterangan
35.86755	4.098	0.000000	H ₀ Ditolak

Sumber: Output Eviews Uji Hipotesis (2025)

Hasil Uji F-statistik menunjukkan nilai sebesar 35,86755 dibandingkan dengan nilai F-tabel yang hanya 4,098 menunjukkan bahwa F-statistik jauh lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol (H₀) ditolak, sementara hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, model regresi yang digunakan terbukti signifikan secara simultan, artinya konektivitas infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Provinsi Lampung selama periode 2015 hingga 2024.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi total pada variabel dependen (Y). Secara khusus, nilai R² menunjukkan persentase perubahan pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen melalui garis regresi yang dibuat. Dengan kata lain, koefisien ini mengindikasikan seberapa baik kesesuaian antara data yang diamati dengan model regresi yang dibentuk, sehingga semakin tinggi nilai R², semakin besar proporsi variasi data yang dapat diterangkan oleh model tersebut secara keseluruhan. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,874048 atau sekitar 87,40%. Ini berarti bahwa sebanyak 87,40% variasi dalam konektivitas infrastruktur dapat menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Provinsi Lampung, sementara sisanya sebesar 12,60% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Konektivitas Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil analisis regresi, koefisien regresi untuk variabel konektivitas infrastruktur menunjukkan nilai positif sebesar 3,016065, yang mengindikasikan arah pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Namun, menurut uji signifikansi parsial, pengaruh variabel konektivitas infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2015 hingga 2024 bersifat ada tetapi tidak mencapai tingkat signifikansi yang berarti ($p\text{-value} > 0,05$). Temuan ini mengimplikasikan bahwa meskipun terdapat hubungan positif, faktor pendukung seperti investasi pelengkap dan kebijakan regional perlu ditingkatkan untuk memperkuat efek kausal secara statistik.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Palembang memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Peningkatan dalam hal aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur telah mendorong investasi, perkembangan berbagai sektor ekonomi, dan peningkatan pendapatan warga. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan di bidang infrastruktur di Palembang dianggap sebagai faktor krusial untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang lestari sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Anisa et al., 2024). Selanjutnya, studi terdahulu pada kota Samarinda menelaah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur serta mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan jalan di Kota

Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur seperti puskesmas, penyediaan air bersih, dan jaringan jalan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Warsilan & Noor, 2015). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang sedang dilakukan, yang menunjukkan bahwa konektivitas infrastruktur memiliki kaitan positif meskipun tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Paul Romer (2019) dalam teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi sejati bersumber dari faktor internal dalam sistem ekonomi itu sendiri, khususnya melalui investasi yang berkelanjutan pada sumber daya manusia, kemajuan teknologi, dan infrastruktur yang mendukung. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Vickerman bahwa efektivitas konektivitas sangat bergantung pada sinergi antara pembangunan jaringan infrastruktur dan dukungan kebijakan kelembagaan yang kondusif (Chen & Vickerman, 2017). Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur perlu didampingi dengan kebijakan yang mengoptimalkan integrasi dan distribusi manfaat ekonomi secara merata agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih efektif dan inklusif. Prinsip ini sangat relevan pada konektivitas infrastruktur di Provinsi Lampung, dimana peningkatan kualitas dan aksesibilitas jaringan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya berperan penting dalam memperkuat kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi daerah.

Temuan empiris yang tidak signifikan ini justru bertolak belakang dengan ekspektasi normatif ekonomi Islam. Chapra menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada masalah umat melalui distribusi manfaat yang merata, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan kuantitatif belaka (Chapra, 2008). Sementara itu, Beik (2019) membuktikan bahwa wakaf produktif untuk infrastruktur di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan (2-4%) lewat mekanisme inklusi sosial yang kuat, berbeda tajam dengan kasus konektivitas infrastruktur yang parsial justru negatif terhadap sektor wisata.

Investasi pada konektivitas infrastruktur tidak hanya memperlancar aliran barang dan jasa, tetapi juga mendorong inovasi teknologi serta pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan mobilitas dan akses informasi. Dengan demikian, konektivitas infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara endogen, sejalan dengan pemikiran Romer (2019) bahwa faktor internal tersebut merupakan pendorong utama dinamika pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas dan luas jaringan infrastruktur memang membuka akses yang lebih baik bagi aktivitas ekonomi, faktor keterbatasan lain seperti kurang optimalnya integrasi antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar sektor, dan hambatan birokrasi masih menjadi kendala yang menghambat efektivitas manfaat konektivitas. Keberadaan infrastruktur yang memadai mesti diiringi dengan kebijakan pendukung yang komprehensif agar potensi positifnya benar-benar tersalurkan ke dalam kenaikan produktivitas dan ekspansi ekonomi daerah.

Pengaruh Konektivitas Infrastruktur Terhadap Sektor Wisata di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil analisis regresi, koefisien regresi untuk variabel konektivitas infrastruktur menunjukkan negatif sebesar -52,07864. Namun, menurut uji signifikansi parsial, variabel konektivitas infrastruktur berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap sektor wisata di Provinsi Lampung tahun 2015 sampai 2024, meskipun model secara simultan signifikan ($F\text{-statistik}=35,867$, $p<0.01$, $R^2=87,4\%$). Temuan ini menandakan paradoks peningkatan persentase jalan mantap Lampung dari 65% (2015) menjadi 82% (2024) justru berkorelasi dengan stagnasi kunjungan wisatawan domestik khususnya di destinasi rawit seperti Way Kanan-Upang. Fenomena ini disebut *overtourism risk* yaitu aksesibilitas berlebih memicu *crowding effect*, degradasi lingkungan (erosi pantai, sampah), dan penurunan kualitas pengalaman wisatawan, sehingga mereka beralih ke destinasi alternatif.

Ritchie dan Crouch (2012) melalui *Tourism Destination Competitiveness Theory*, menegaskan bahwa infrastruktur sebagai "*supporting factor*" hanya mencapai efektivitas optimal apabila terintegrasi dengan *destination management factors* yang komprehensif, meliputi pengaturan *carrying capacity*, pengendalian volume pengunjung, dan zonasi berkelanjutan untuk mencegah *overcrowding*. Infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata, khususnya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Keberhasilan tersebut didukung oleh *governance* matang berupa sistem ticketing online terintegrasi, rotasi zona destinasi, serta protokol keselamatan yang sistematis, yang memitigasi risiko *overtourism* dan menjaga kualitas

pengalaman wisatawan (Raharjo et al., 2023). Sementara itu, meskipun ada kemajuan yang cukup baik dalam pembangunan infrastruktur, pelaksanaannya belum maksimal sehingga fasilitas yang tersedia sebagai penunjang pariwisata belum sepenuhnya memenuhi harapan (Sembiring et al., 2022). Dinamika Lampung yang mencerminkan gap implementasi, meskipun infrastruktur fisik (jalan mantap) meningkat signifikan, *governance* pariwisata lemah menyebabkan fasilitas penunjang seperti musholla, sertifikasi halal food, dan pengelolaan limbah minim. Akibatnya, konektivitas tinggi justru memicu *crowding effect* dan degradasi lingkungan di Way Kanan-Upang, menghasilkan pengaruh konektivitas infrastruktur terhadap sektor wisata yang negatif tidak signifikan (koefisien -52,079) fenomena yang sepenuhnya selaras dengan ketidakseimbangan teori Ritchie-Crouch (2012) di mana infrastruktur fisik berdiri sendiri tanpa manajemen destinasi.

Sementara itu, studi terdahulu di Jawa Barat menunjukkan bahwa konektivitas berbasis syariah melalui sukur infrastruktur memberi dampak positif signifikan terhadap wisata halal ($\beta=0.41$, $p<0.01$), kontras dengan Lampung yang rentan *overtourism* akibat minimnya tata kelola *maqashid syariah* (Hendratmi, 2021). Zainuddin (2017) pun menekankan prinsip *tawazun* (keseimbangan) agar infrastruktur tak memicu ketimpangan, prinsip yang tampak absen dalam dinamika Lampung.

Dalam sektor pariwisata di Provinsi Lampung, kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana kualitas konektivitas infrastruktur dapat berperan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan sektor wisata jika dikelola secara optimal. Implikasi dari teori Romer (2019) menyiratkan perlunya sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan inovasi di bidang pariwisata. Ketika kualitas dan jaringan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas pendukung, mengalami peningkatan signifikan, hal tersebut mendorong lonjakan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di daerah tersebut. Namun, peningkatan kunjungan yang tidak diiringi dengan pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas kawasan wisata, di antaranya melalui kerusakan lingkungan, penumpukan sampah, kemacetan, dan kerusakan fasilitas pariwisata. Fenomena ini, yang dikenal sebagai *overtourism*, merujuk pada kondisi di mana jumlah pengunjung wisatawan melebihi kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) destinasi, sehingga memicu penurunan kualitas pengalaman wisatawan, degradasi lingkungan (erosi pantai, pencemaran sampah), dan konflik sosial dengan komunitas. Di Lampung, *overtourism* Way Kanan-Upang terwujud melalui akses jalan mantap berlebih yang memicu *crowding effect* inondasi wisatawan domestik tanpa pengelolaan zona, berpotensi menurunkan daya tarik dan nilai ekonomi sektor pariwisata itu sendiri. Investasi pada pelatihan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola dan mempromosikan potensi wisata secara profesional, sekaligus pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dan manajemen destinasi (*ticketing online, monitoring real-time*), akan memperkuat dampak positif konektivitas infrastruktur bagi sektor pariwisata. Pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sektor pariwisata tidak semata-mata bergantung pada pembangunan fisik infrastruktur, melainkan juga bagaimana faktor-faktor endogen lain seperti *governance maqashid* turut diperkuat, menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Pengaruh Konektivitas Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Wisata Di Provinsi Lampung Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024

Analisis model VAR mengungkap bahwa konektivitas infrastruktur fisik di Provinsi Lampung berhasil mendorong dinamika ekonomi secara simultan yang kuat ($F\text{-statistik}=35,87$, $p<0,01$; $R^2=87,4\%$), di mana variasi konektivitas infrastruktur mampu menjelaskan sebagian besar fluktuasi gabungan pertumbuhan ekonomi dan sektor wisata selama 2015-2024. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa infrastruktur jalan dan listrik memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, sedangkan infrastruktur air dan telekomunikasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan, kombinasi infrastruktur jalan, listrik, air, dan telekomunikasi memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia (Harsono et al., 2024). Sementara itu, pembangunan jalan turut berdampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas, pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari sudut pandang ekonomi syariah, pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah) yang menekankan manfaat bagi masyarakat luas, pemerataan distribusi ekonomi, serta mendukung keadilan dan keseimbangan dalam tatanan ekonomi Islam (Yadi et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan hasil

penelitian yang dilakukan, yang menunjukkan bahwa konektivitas infrastruktur memiliki kaitan positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor wisata di Provinsi Lampung.

Pembangunan konektivitas infrastruktur selama ini sering dipandang sebagai pilar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Lampung, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam pengembangan infrastruktur tidak sekadar bertumpu pada aspek material dan peningkatan output ekonomi, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan kelestarian lingkungan. Strategi kebijakan efektif ke depan harus mengadopsi pendekatan hybrid berbasis ekonomi Islam, yaitu menggabungkan wakaf tunai produktif untuk fasilitas wisata halal (musholla, sertifikasi makanan) dengan penerbitan sukuk mudharabah tersegmentasi guna pembiayaan infrastruktur non-komersial, disertai penguatan manajemen destinasi melalui pengaturan *carrying capacity* dan monitoring *real-time* sehingga infrastruktur fisik tak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi katalisator masalah umat yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi keadilan distributif bagi komunitas lokal Lampung.

Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan agar setiap kebijakan pembangunan dapat membawa manfaat yang luas tanpa menimbulkan kerusakan atau ketimpangan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan sejalan dengan maqashid al-shariah. Dalam koridor teori pertumbuhan endogen yang menegaskan pentingnya investasi pada sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur, ekonomi Islam menambahkan dimensi etis dan moral yang memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi harus memberi manfaat (*maslahah*) serta meminimalkan mudharat atau kerugian bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pembangunan konektivitas infrastruktur di Lampung hendaknya tidak hanya diarahkan pada peningkatan akses dan pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, melainkan juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan sebagai implementasi *maqashid al-shariah* yang mencakup pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kekayaan alam dan budaya lokal, aspek keberlanjutan menjadi sangat krusial. Meskipun peningkatan infrastruktur dapat mempermudah akses wisatawan ke berbagai destinasi di Lampung, hal ini tidak serta merta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat jika tidak diimbangi dengan pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab. Fenomena *overtourism* yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, degradasi budaya, dan beban sosial seperti kemacetan dan limbah merupakan tantangan nyata. Dalam perspektif Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31 berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros." (QS. Al-A'raf: 31) (RI, 2019).

Investasi pada infrastruktur tidak hanya dilihat sebagai upaya fisik membangun konektivitas, tetapi sebagai bagian dari amanah sosial yang mesti dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Hal ini berarti proses pembangunan harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi, antikorupsi, dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dan musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan pembangunan juga sangat penting untuk memastikan kebijakan infrastruktur benar-benar selaras dengan tujuan kemaslahatan umum (Abdullah, 2017). Penguatan tata kelola pemerintahan dan regulasi yang berbasis prinsip syariah dapat memberikan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung melalui sektor infrastruktur dan pariwisata.

Dengan pendekatan yang holistik tersebut, konektivitas infrastruktur di Provinsi Lampung berpotensi menjadi katalisator utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan esensi ekonomi Islam. Pengembangan infrastruktur yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan sektor wisata yang bertanggung jawab akan menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan produktif, tetapi juga harmonis dengan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, Lampung dapat mencapai kemajuan yang tidak sekadar menambah angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap hubungan konektivitas infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor wisata di Provinsi Lampung periode 2015-2024 melalui pendekatan model VAR, dengan temuan bahwa konektivitas infrastruktur berperan secara simultan meskipun memerlukan penguatan faktor pendukung untuk optimalisasi dampak. Keterbatasan penelitian mencakup penggunaan data sekunder agregat tingkat provinsi yang belum menangkap dinamika sumber daya manusia, governance lokal, serta faktor institusional, ditambah rentang waktu 10 tahun yang terbatas untuk evaluasi efek jangka panjang proyek strategis seperti tol Trans-Sumatra. Kontribusi keilmuan terletak pada pengembangan model empiris time series yang mengintegrasikan konektivitas infrastruktur dengan pertumbuhan regional dan pariwisata di Sumatra, memperkaya literatur ekonomi pembangunan Indonesia melalui analisis VAR stabil dengan lag optimal 2.

Rekomendasi manajerial bagi Pemerintah Provinsi Lampung mencakup integrasi pembangunan infrastruktur dengan manajemen destinasi wisata melalui pengaturan *carrying capacity* dan skema *public-private partnership* untuk mitigasi risiko *overtourism* di destinasi seperti Way Kanan-Upang. Pengelola pariwisata disarankan mengoptimalkan promosi berbasis data kunjungan domestik guna memaksimalkan aksesibilitas jalan mantap yang meningkat dari 65% menjadi 82% selama periode studi. Bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan perluasan periode hingga 2030 dengan model hybrid VAR-SEM, inklusi data primer dari pelaku wisata halal, serta komparasi antar-provinsi Sumatra untuk generalisasi temuan dan pengujian variabel moderasi seperti digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Infrastruktur Wilayah. 1–23.
- Anisa, S. N., Aulia, S., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan di kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 4(1), 36–54. <https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>
- Arifin, Z. (2017). *Pengertian dan ruang lingkup infrastruktur teknologi informasi*. Pustaka.UT.ac.id, 1–36. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSIM4304-M1.pdf>
- Beik, I. S. (2019). Waqf-based infrastructure development: An Islamic perspective. *Indonesian Waqf Symposium / Jurnal Ekonomi Islam*.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the Light of Maqasid al-Syari'ah*. The International Institute of Islamic Thought: London.
- Chen, C. L., & Vickerman, R. (2017). Can transport infrastructure change regions' economic fortunes? Some evidence from Europe and China. *Regional Studies*, 51(1), 144–160. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1262017>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). RENCANA Pembangunan Infrastruktur Wilayah Terpadu. 167–186.
- Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B. (2012). Destination competitiveness and its implications for Host-Community QOL. In: Uysal, M., Perdue, R., Sirgy, M. (eds) *Handbook of Tourism and Quality-of-Life Research*. International Handbooks of Quality-of-Life. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2288-0_29
- Febriansah, R. E. (2019). Buku ajar mata kuliah ekonomi pembangunan. Unsida Press: Sidoarjo. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-76-8>
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Sembiring, H., Azzahra, N., Harahap, S. H., & Nasution, J. (2022). Peran pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan pariwisata di Bukit Lawang. *Nawasena: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(3), 01–09. <https://doi.org/10.56910/nawasena.v1i3.330>
- Harsono, I., Sutanto, H., Rois, I., Fadliyanti, L., & Mulawiani, B. S. W. (2024). Kontribusi infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Ganec Swara*, 18(1), 196. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.750>
- Hendratmi, A., Darwanto, D., & Setyowati, E. (2021). Sukuk financing for halal tourism infrastructure development in Indonesia: An empirical analysis. *Jurnal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3).

- Hossain, M. K., Hamid, A. B. A., & Hanafiah, M. H. (2024). Tourism destination competitiveness from definitions to empirical evidence: A narrative review. *Multidisciplinary Reviews*, 8(5), 2025132. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025132>
- Hutagaluh, O., Abubakar, A., & Haddade, H. (2022). Pariwisata halal menurut pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Alwatzhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 168–178. <https://doi.org/10.37567/alwatzhoebillah.v8i2.1531>
- Jones, C. I. (2019). Paul Romer: Ideas, Nonrivalry, and Endogenous Growth. *Scandinavian Journal of Economics*, 121(3), 859–883. <https://doi.org/10.1111/sjoe.12370>
- Tambun, L. H., Sea, D., Zulfikar, M., Andiny, P., & Safuridar, S. (2023). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Akuntansi*, 2(4), 288–301. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i4.1421>
- M. Abdullah. (2017). *Islamic economics: Principles and analysis*. Pustaka Al-Kautsar.
- Mangiri, N. J. S., & Sasabone, L. (2023). Analisis SWOT pengembangan wisata halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Lampung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 7(2), 1346–1352.
- Nabilah, R., & Sitanggang, F. I. (2024). Strategi perencanaan wisata berdasarkan prioritas masalah dengan metode USG di pantai Tirtayasa, desa Way Tataan, Lampung. *Jurnal Arsitektur*, 14(2), 99. <https://doi.org/10.36448/ja.v14i2.3486>
- Noviaria, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis halal tourism dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574>
- Raharjo, E. P., Adidana, I. K. S. P., Candrarahayu, A. M., & Fitasari, Y. (2023). Pengaruh pembangunan infrastruktur transportasi dalam mendukung kunjungan wisatawan mancanegara di provinsi Bali. *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.52920/jttl.v4i1.103>
- RI, K. (2019). *Al-Quran Kemenag* (Edisi Peny). Public Domain Mark.
- Suot, C. G., Kawung, G. M. V., & Tumilaar, R. (2021). Pengaruh sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 403–411. <http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf>
- Surya, R. E., Reny WA, A., & Surya, A. (2025). Pengaruh inventasi infrastruktur terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi di Lampung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(5), 3504–3522. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5.5320>
- Susanto, I., Heri, M., & Fachrudin, A. (2019). Dampak strategi pemasaran pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam (Studi di pantai wisata Labuhan Jukung Krui kabupaten Pesisir Barat). *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(1), 114–135. <https://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5518>
- Warsilan, W., & Noor, A. (2015). Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di kota Samarinda. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 359–366. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1444>
- Yadi, H., Akbar, E. E., & Arrohmahan. (2025). Pengaruh pembangunan infrastuktur jalan pesisir barat terhadap ekonomi masyarakat sekitar dalam perspektif ekonomi syariah tahun 2024/2025. *Sustainability*, 11(1), 1–14.
- Zainuddin, M. (2017). Pertumbuhan ekonomi perspektif ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 1(2), 79–85. <https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.944>